

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Cetak	Suara Merdeka
Media Online

Wilayah: Kabupaten Kudus

Halaman 14

Ribuan Data Penerima Bansos Ganda

KUDUS - Ribuan data penerima bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Kudus diketahui ganda. Duplikasi data penerima bansos ini terungkap saat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah melakukan monitoring penyaluran bansos di Kudus.

Kepala Inspektorat Kabupaten Kudus Adhi Hardjono membenarkan temuan tersebut saat menyisir 79 desa dari total 123 desa di Kabupaten Kudus. Bansos yang dicairkan untuk warga Kabupaten Kudus terdiri atas bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bansos Kabupaten Kudus, Bansos Provinsi Jateng, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Total penerima mencapai 69.781 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dari jumlah itu ada sebanyak 2.752 KPM atau sekitar 3,94 persen duplikasi atau penerima ganda, katanya pada rapat koordinasi penanganan dampak Covid-19 di DPRD Kudus, Kamis (4/6).

Adhi menambahkan, satu KPM

hanya boleh menerima satu jenis bansos.

Jika ada yang dobel bansos, lanjut Adhi, muncul yang namanya duplikasi. Penerima ganda tersebut akan ditertibkan pada pencairan berikutnya.

Pemasangan Stiker

Pemdes diminta membuat berita acara penyesuaian agar salah satu KPM memilih salah satu jenis bansos, katanya. "Rekomendasi kami harus ada penyesuaian untuk pencairan berikutnya. Jika nanti tetap membandel tentu akan ada sanksinya," katanya.

Menanggapi itu, Ketua DPRD Kudus meminta dinas terkait serius melakukan pendataan warga miskin. Jika perlu, DPRD Kudus akan mengusulkan anggaran untuk kegiatan pen-

dataan tersebut.

Selain itu pemasangan stiker di rumah KPM juga kurang efektif karena tulisan di stiker kurang tegas. "Harusnya jangan ditulis keluarga prasejahtera, tetapi langsung ditulis keluarga miskin dengan warna dan ukuran font yang mencolok," katanya.

Sebelumnya, Plt Bupati Hartopo mengakui penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Kudus di masa pandemi belum maksimal. Terbatasnya waktu pendataan menjadi salah satu faktor penyebabnya.

Selain itu, pembatasan kegiatan masyarakat, dinamika koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa pun tidak bisa maksimal, sehingga penyaluran tidak begitu maksimal. (H62-20)